



**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DI KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun Oleh :

Nanda Herningtyas Apriliani Eka Kusuma

NPM 2116500039

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NANDA HERNINGTYAS APRILIANI EKA KUSUMA

NPM : 2116500039

Jenjang : Strata Satu (S1)


Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DIKABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018** adalah benar – benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan penuh kesadaran.

Pemalang, Februari 2021




NANDA HERNINGTYAS
NPM : 2116500039



PERETUJUAN

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tegal, 1 Februari 2021

Telah disetujui oleh,

Dosen Pembimbing I

Dra.Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si
NIP. 196305271988032001

Dosen Pembimbing II

Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si
NIPY. 16952681974

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si
NIPY.16952681974



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
Jl. Halmahera KM. 1 Tegal Telp (0283) 323290

PENGESAHAN

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018

Telah dipertahankan dalam siding terbuka skripsi Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada hari : Senin
Tanggal : 1 Februari 2021

1. Ketua Dewan Penguji : Dr. Nuridin, SH. MH
NIPY. 9351091960
2. Sekertaris Dewan Penguji : Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si
NIPY. 16952681974
3. Anggota Dewan Penguji : Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si
NIP. 196305271988032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Nuridin, SH. MH
NIPY. 9351091960

MOTTO

“Pada saatnya kamu akan melupakan segalanya. Dan akan ada saatnya semua orang melupakanmu. Selalu renungkan bahwa akhirnya kamu tidak akan menjadi siapa siapa dan lenyap dari Bumi”

-Marcus Aurelius (*Meditations*)

PERSEMBAHAN

Skripsi yang telah selesai ini tentu mengalami suka maupun duka di dalam proses pembuatan dan penyusunannya, maka dari itu peneliti ingin mempersembahkan karya ilmiah ini untuk :

1. Allah SWT sebagai rasa syukur atas kekuasaan dan perlindungan-Nya, telah memberikan hidayah dan karomah serta kesehatan dan semangat dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
2. Mama Tercinta saya (Dwi Endang Setyaningsih) yang selalu support dan mendoa'kan saya, serta adik tersayang (Galuh Setyawan) yang menjadikan saya semangat agar menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua Dosen dan Dekan FISIP tanpa terkecuali yang sudah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pelaksanaan dan selesainya penelitian ini .
4. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa FISIP Universitas Pancasakti Tegal angkatan 2016.
5. Temanku Monik Sersanada, Sufitania Lorenza, Dwi Arum dan Mega terimakasih untuk dukunganya dan selalu mendengar keluh kesah saya.

ABSTRAK

Kusuma, Nanda Herningtyas Aprilliani Eka, 2021. *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pemalang 2018*. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I: Dra. Sri Sutjiatmi,M.Si dan Pembimbing II: Agus Widodo S.Ip,M.Si

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki beberapa tugas salah satunya yaitu Memutakhirkan Data. Tujuan dari Pemutakhiran Data Pemilih adalah kebenaran dari data pemilih yang tercatat setiap pemilih hanya di daftar satu kali, untuk memverifikasi kevalidan data yang komprehensif,akurat dan terkini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) yang tidak sedikit, banyak faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah pemilih tambahan sehingga pemutakhiran data tidak bisa mencapai tujuannya.

Metode yang digunakan peneliti adalah Deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan bagaimana Peran KPU dalam melaksanakan Data Pemilih di Kabupaten Pemalang. Teknik pengumpulan Data yang digunakan peneliti adalah wawancara pada beberapa Informan diantaranya yaitu 2 orang dari KPU dan 3 orang lainnya dari Petugas Lapangan serta menggunakan data sekunder sebagai Data pendukung peneliti.

Hasil Penelitian bahwa Peran KPU dalam Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Pemalang sudah baik,hanya saja kurang maksimal hal ini dikarenakan ada kendala pada proses petugas dilapangan. Faktor-fakor yang mempengaruhi adalah kurangnya Partisipasi Masyarakat mengenai Pemutakhiran Data Pemilih,kurangnya Komunikasi/Koordinasi yang baik antara antara KPU,Petugas lapangan dan Tokoh masyarakat yang lebih mengenal wilayahnya, Rendahnya sistem Informasi yang ada. Sehingga Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 jumlahnya cukup banyak.

Kata Kunci : KPU, Pemutakhiran Data Pemilih, Pemilihan Gubernur 2018

ABSTRACT

Kusuma, Nanda Herningtyas Aprilliani Eka, 2021. *The Role of the General Election Commission (KPU) in Updating Voters' Data in Governor Elections in Pemalang Regency 2018*. Thesis, Governmental Science, Pancasakti University, Tegal. Advisor I: Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si and the Second Advisor: Agus Widodo S.Ip, M.Si

In Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections, The General Election Commission (KPU) has several tasks, one of which is Updating Data. The purpose of updating voter data is the correctness of the voter data recorded by each voter in the list only once, to verify the validity of the data that is comprehensive, accurate and up to date..

This research was motivated by the problem of the number of additional voter lists (DPTb) which was not small, many factors caused the large number of additional voters so that updating of the data could not achieve its goals.

The method used by researchers is descriptive qualitative to describe the role of the KPU in implementing Voter Data in Pemalang Regency. The data collection technique used by researchers was interviews with several informants including 2 people from the KPU and 3 other people from the field officers and using secondary data as supporting data for researchers.

The results of the study show that the role of the KPU in updating voter data in Pemalang Regency is already good, it's just that it is not optimal because there are obstacles in the process of field officers. The influencing factors are the low level of public human resources regarding updating voter data, lack of communication / Good coordination between the KPU, field officers and community leaders who are more familiar with their area, Low information system which exists. So that the Additional Voters List in the 2018 Governor Election is quite a lot.

Keywords : *KPU, Voter Data Updating, 2018 Governor Election*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Praktis	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	15
2.2.2 Pemutakhiran Data	21
2.2.3 Cara melakukan Pendataan.....	25
2.2.4 Syarat Menjadi Pemilih	26
2.2.5 Cara Mengajukan Perbaikan Identitas	27
2.5 Definisi Konsep.....	29

2.4	Pokok-Pokok Penelitian	29
2.5	Alur Pikir	31
BAB III		33
METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Metode Penelitian.....	33
3.2	Tipe Penelitian	34
3.3	Jenis dan Sumber Data	35
3.4	Informan Penelitian	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data	37
3.6	Teknik Analisis Data	40
BAB IV		43
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....		43
4.1	DESKRIPSI WILAYAH.....	43
4.2	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang	45
4.2.1	Struktur Organisasi KPU kabupaten Pemalang	46
4.2.2	Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)	47
4.2.3	Fungsi, Wewenang dan Tugas KPU	48
BAB V		50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
5.1	Pembahasan Hasil Penelitian.....	51
5.2	Pembahasan atas Penelitian	69
BAB VI.....		73
PENUTUP		73
6.1	Kesimpulan	73
6.2	Saran	75

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Pemilih Sementara di Kabupaten Pemalang.....	6
Tabel I.2 Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Pemalang	7
Tabel I.3 Daftar Pemilih Tambahan di Kabupaten Pemalang.....	9
Tabel 3.I Daftar Nama Informan.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Pikir Peneliti.....	32
Gambar 4.1	Peta wilayah Kabupaten Pematang 44	44
Gambar 4.2	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pematang.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam melakukan pemilihan Eksekutif maupun Legislatif. Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang di dasarkan pada doktrin "*power of the people*" yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Menurut Joseph A Schmitter (dalam M.Taupan 1989:21) Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang artinya semua manusia memiliki kebebasan dan kewajiban yang sama.

Sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi maka Indonesia melakukan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu pada dasarnya memiliki esensi yang sama dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurut Marijan (2010:83) pemilu merupakan Instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Sedangkan menurut Abdullah (2009:3) pemilu yang berkualitas dari sisi prosesnya, apabila pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Sedangkan dilihat dari sisi hasilnya, pemilu itu harus dapat menghasilkan pemimpin daerah yang mampu mewujudkan

cita-cita nasional dan kemajuan daerah. Dari pengetahuan diatas dapat dikatakan bahwa Pemilu adalah sebuah perwujudan negara demokrasi dengan memilih suatu Kepala Daerah dengan berkualitas,demokratis,aman,tertib dan terbuka.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota adalah Tugas dan Wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Sebagai penyelenggara pemilihan umum maka peran komisi pemilihan umum (KPU) sangat strategis. Secara terminologis peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2016:212). Dapat dikatakan pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu pada pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional,tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU

merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen yaitu lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) KPU memiliki tugas seperti yang tertera di pasal 12 yaitu, Merencanakan Program dan anggaran serta menetapkan jadwal; menyusun tata kerja KPU; KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota PPK, PPS, PPLN, dan KPPSLN; Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; Mengoordinasikan menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan Pemilu; Menerima Daftar Pemilih dari KPU provinsi; Memutakhirkan Daftar Pemilih berdasarkan KPU provinsi; Memutakhirkan Daftar Pemilih berdasarkan daftar pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (bawaslu); Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya; menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu; Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan pemilu; dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang.

Dari Tugas KPU diatas salah satu tugas yang harus dilakukan adalah Memutakhirkan Data Pemilih. Pemutakhiran Data Pemilih merupakan salah satu tahapan pemilihan yang sangat penting untuk terselenggaranya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota, karena pada hakikatnya pemilihlah yang mempunyai hajat demokrasi ini dan pemilihlah yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpi dan memimpin untuk suatu daerah 5 (tahun kedepan).

Penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil tidak terlepas dari keberhasilan Pemutakhiran data pemilih. Pada tahap tersebut KPU harus memastikan semua pemilih terdaftar melalui mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih. Maka dari itu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ditingkat yang paling bawah hingga KPU wajib memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, dan bersih dari pemilih ganda. Tujuan dari Pemutakhiran Data Pemilih adalah kebenaran dari data pemilih yang tercatat setiap pemilih hanya di daftar satu kali, untuk memverifikasi kevalidan data yang komprehensif, akurat dan terkini.

Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor :12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, menyebutkan

bahwa KPU Provinsi menerima Data hasil Sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan DP4 hasil analisis dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran.

. Adapun cara melakukan pendataan yang dilakukan petugas tertera pada peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 Pasal 11 ayat (6) yaitu :

- a) Mencatat pemilih yang tidak memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK;
- b) Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;
- c) Mencoret pemilih yang meninggal;
- d) Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e) Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI / POLRI.
- f) Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum menikah pada hari pemungutan suara.
- g) Mencoret data pemilih yang dipastikan tidak ada keberadaannya
- h) Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter.
- i) Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- j) Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom disabilitas dan;

k) Mencoret pemilih,yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemiliha

Tabel 1.1

Daftar Pemilih Sementara di Kabupaten Pemalang tahun 2018

No	Kecamatan	Jml TPS	Daftar Pemilih Sementara (DPS)		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Moga	121	27.379	26.580	53.959
2	Pulosari	107	22.853	22.733	45.586
3	Belik	195	45.451	43.708	89.159
4	Watukumpul	126	28.174	27.245	55.419
5	Bodeh	99	23.886	23.262	47.148
6	BantarBolang	142	32.910	32.621	65.531
7	Randudongkal	193	43.083	42.435	85.518
8	Pemalang	323	72.369	71.886	144.255
9	Taman	327	69.271	67.800	137.071
10	Petarukan	288	63.417	62.412	125.829
11	Ampelgading	105	28.128	27.979	56.107

12	Comal	134	35.183	34.923	70.106
13	Ulujami	175	43.966	42.539	86.505
14	Warungpring	81	17.055	16.598	33.653
Jumlah		2.416	553.075	542.721	1.095.796

Sumber: KPU kabupaten Pemalang

Tabel diatas merupakan data pemilih Sementara yang diambil dari KPU se Kabupaten Pemalang pada Pemilihan Gubernur tahun 2018, yang mencakup 14 kecamatan, 222 Desa, 2.416 TPS. Sebanyak 1.095.796 Daftar Pemilih Sementara dengan pemilih laki-laki berjumlah 553.075 dan perempuan berjumlah 542.721.

Tabel 1.2

Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Pemalang tahun 2018

No	Kecamatan	Jml TPS	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Moga	121	26.856	26.038	52.894
2	Pulosari	107	22.352	22.211	44.563
3	Belik	195	44.154	42.608	86.762
4	Watukumpul	126	27.591	26.705	54.296
5	Bodeh	99	23.698	23.048	46.746

6	BantarBolang	142	32.165	31.918	64.083
7	Randudongkal	193	42.434	41.793	84.227
8	Pemalang	323	71.426	71.122	142.548
9	Taman	327	67.811	66.502	134.313
10	Petarukan	288	61.950	61.109	123.059
11	Ampelgading	105	27.771	27.656	55.427
12	Comal	134	34.662	34.481	69.143
13	Ulujami	175	43.193	41.805	84.998
14	Warungpring	81	16.798	16.373	33.171
Jumlah		2.416	542.861	533.369	1.076.230

Sumber: KPU kabupaten Pemalang

Tabel berikutnya Merupakan Data valid yang sudah dimutakhirkan oleh petugas. Jumlah keseluruhan pemilih 1.076.230 dari jumlah laki-laki 542.861 dan jumlah perempuan 533.369. pada tabel DPT mengalami perubahan jumlah pemilih setelah dimutakhirkan, sedikit berkurang sekitar 19.566 pemilih. Artinya petugas lapangan melakukan tugas sebagaimana mestinya yaitu memutakhirkan data yang komprehensif, akurat dan terkini.

Tabel 1.3

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kabupaten Pemalang tahun 2018

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Moga	96	73	169
2	Pulosari	72	67	139
3	Belik	90	105	195
4	Watukumpul	115	135	250
5	Bodeh	65	69	134
6	BantarBolang	71	76	147
7	Randudongkal	171	181	352
8	Pemalang	353	396	749
9	Taman	342	381	723
10	Petarukan	297	319	616
11	Ampelgading	86	87	173
12	Comal	175	138	313
13	Ulujami	186	144	330
14	Warungpring	21	27	48

Jumlah	2.140	2.198	4.338
---------------	--------------	--------------	--------------

Sumber : KPU Kabupaten Pemalang

Tabel diatas merupakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan jumlah 4.338 terdiri 2.140 pemilih laki-laki dan 2.198 pemilih perempuan tersebar di semua kecamatan,se Kabupaten Pemalang. Daftar Pemilih Tambahan atau disingkat DPTb adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih,dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP atau Surat Keterangan (Suket) ke TPS terdekat dengan syarat apabila tersedia Surat Suara. Dari tabel DPTb diatas menunjukkan bahwa Tahapan Pemutakhiran Data belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ada masyarakat yang tidak terdata oleh petugas. Dalam hal ini tujuan KPU untuk memutakhirkan data yang komprehensif,akurat dan terkini berarti belum sepenuhnya tercapai.

Kondisi di lapangan ini membawa penulis pada pertanyaan; bagaimana peran KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data pada saat menjelang pemilu? Berdasarkan pemikiran diatas penulis bermaksud mengajukan judul **“Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pemalang 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam keberhasilan pemilu, salah satu peran penting tersebut yaitu Memutakhirkan Daftar Pemilih. Hal ini wajib dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan memperhatikan kondisi faktual pemilih dan bersih dari pemilih ganda.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis masih banyak masyarakat yang sepenuhnya mendapat hak pilihnya, sejumlah masyarakat ada yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih di TPS padahal memenuhi syarat sebagai pemilih. Warga dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat membawa KTP atau Surat Keterangan apabila surat suara masih tersedia, jika habis maka warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Hal ini masih banyak terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Pematang Jaya.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menetapkan rumusan masalah.

Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah :

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pemalang 2018 ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih pada Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pemalang Tahun 2018?
3. Apa Solusi yang dilakukan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menggambarkan Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemutakhiran Data pada Pemilihan Gubernur Pemilih di Kabupaten Pemalang 2018.
2. Untuk menggambarkan kendala yang dihadapi oleh dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih pada Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pemalang Tahun 2018.
3. Untuk menggambarkan Solusi yang dilakukan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Dapat digunakan sebagai referensi atau bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

1.5 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sebagai pengetahuan dan wawasan dibidang Pemerintahan serta sebagai sarana untuk mengumpulkan dan mengelola data penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana ilmu pemerintahan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna untuk sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan Pemutakhiran data agar kedepannya lebih relevan dan evisien bagi KPU dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).

3. Bagi Masyarakat (LSM,Parpol)

Penelitian ini dapat berguna sebagai tinjauan dan kontrol LSM untuk memberikan pengertian yang lebih luas mengenai kinerja dan tugas KPU terutama dalam pemutakhiran Data, dan sebagai parpol (Partai Politik) merencanakan strategi Politik pada masa masa kampanye agar masyarakat menggunakan hak pilihnya.

4. Bagi KPU

Penelitian ini diharapkan dapat bahan evaluasi kinerja KPU dalam melakukan pemutakhirkan data agar semua masyarakat dapat menggunaklan hak pilihnya dengan baik dan secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkenaan dengan objek permasalahan yang sekiranya memiliki hubungan yang erat dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat dua penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang pertama, “pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum (studi Terhadap pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada tahun 2018 di Kabupaten Bone) oleh Delvani dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN BONE) di muat di Jurnal Al-Dustur Volume 1 no 1 desember 2018. Penelitian tersebut menggunakan teori dari Subekti,Ramlan dkk,(Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih dan Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar Pemilih. Berdasarkan data yang sudah diperoleh dan pengamatan peneliti bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pemilukada di Kabupaten Bone telah berjalan dengan baik,namun belum terlaksana dengan sempurna. Hal tersebut terjadi karena adanya sejumlah anggota masyarakat yang masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan adanya sejumlah masyarakat yang tidak berada dirumah pada saat proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sehingga pemutakhiran data pemilih tersebut tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dan yang kedua jurnal yang berjudul “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam Pemutakhiran Data Pemilih” oleh Agung Nugraha, Nirmala Sari, Gusila Ningsih, Mindi Syahri Ramdani di muat dalam Datin Law Jurnal Vol.No 1 Februari 2020. Penulis menggunakan teori dari Rozali Abdullah, Sistem Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ditinjau dari sudut pandang Demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh oleh penulis bahwa jurnal tersebut mempunyai kesimpulan Kinerja KPU kabupaten merangin dalam pemutakhiran data masih jauh dari kata sempurna hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah pemilih yang mengeluh karena tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), masih adanya pemilih fiktif dan masih adanya pemilih ganda kurangnya peran aktif warga dalam memastikan diri terdaftar sebagai pemilih, petugas tidak melakukan tugas secara maksimal. Sehingga terjadinya konflik dalam pemilihan umum.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a. Pengertian Peran

Menurut Thoah (1997) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).

Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang-orang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran (soekanto, 2009: 213).

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (Tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di ketahui bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal diatas dapat diartikan bahwa peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang.

b. Pemilihan Umum (Pemilu)

Sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi maka indonesia melakukan pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan Umum (Pemilu) pada dasarnya memiliki esensi yang sama dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurut Marijan (2010:83) pemilu merupakan Instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Sedangkan menurut Abdullah (2009:3) pemilu yang berkualitas dari sisi prosesnya,apabila pemilu berlangsung secara tertib dan aman. Sedangkan menurut Budiarjo (2008:461) Pemilu adalah Lambang,sekaligus tolak ukur,dari demokrasi itu. Hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan dalam suasana terbuka dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat,dianggap

mencerminkan dengan akurat serta partisipasi-partisipasi masyarakat.

Dari pengetahuan diatas dapat dikatakan bahwa Pemilu adalah sebuah perwujudan negara demokrasi dengan memilih suatu Kepala Daerah dengan berkualitas,demokratis,aman,tertib dan terbuka.

Menurut Budiarjo,ada beberapa macam variasi Pemilu,tetapi berkisar pada dua prinsip pokok yaitu :

- a) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan umum memilih satu wakil,biasanya disebut sistem distrik).
- b) *Multi-Member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil,biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau sistem Proporsional).

Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing sistem politik.

c. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam UU No 15 tahun 2011 pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota.

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non partisipan. Untuk itulah penyelenggaraan pemilu diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 mengenai badan-badan yang lain bertugas dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Badan-badan tersebut yaitu : (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (2) Badan Pengawas Provinsi (Bawaslu Provinsi). (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/kota (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). (5) Panitia Pengawas Lapangan (6) Pengawas Pemilu Lapangan (7) Pengawas Lapangan Luar Negeri (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP). (9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (10) Panitia pemungutan Suara (PPS) (11) Panitia

Pemilihan Luar Negeri (PPLN). (12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.

d. Fungsi, Wewenang dan Tugas KPU

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya KPU memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Perubahan dari UU no 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas dan wewenang tersebut adalah :

a) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD seperti :

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- 2) Mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilu;
- 3) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

b) Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil presiden seperti;

- 1) Merencanakan program anggaran serta menetapkan jadwal;
- 2) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

- 3) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- c) Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota seperti :
 - 1) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah.
 - 2) Mengordinasikan dan memantau tahapan pemilihan.
 - 3) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

Demikian dari penjabaran diatas bahwa peranan KPU sangat penting dalam keberlangsungan pemilihan umum, untuk menciptakan pemilu yang umum, bebas, jujur dan adil. Bahwa KPU adalah lembaga penanggung jawab pemilu dimana tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang ada.

2.2.2 Pemutakhiran Data

a. Pengertian Pemutakhiran

Pemutakhiran Data Pemilih pada dasarnya menganut dua sistem (stelsel), yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Sistem pemutakhiran daftar pemilih termasuk kategori aktif ataukah pasif akan dilihat dari sisi keterlibatan pemilih.

Stelsel aktif adalah, penyelenggara pemilu (KPU) memiliki kewajiban mengumumkan daftar pemilih sementara yang tersedia

kepada warga masyarakat di tempat-tempat yang strategis. Sistem ini mengutamakan warga untuk aktif melihat dan memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih yang diumumkan. Pada intinya partisipasi masyarakat diutamakan pada sistem ini.

Sedangkan stesel pasif adalah petugas pemutakhiran data pemilih aktif mendatangi rumah-rumah warga untuk mengecek apakah anggota keluarga sudah terdaftar sebagai pemilih, pemilih pemula atau ada anggota keluarga yang meninggal.

Pada Pemilu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 diterapkan stesel pasif. Dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagai KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS. Hasil Pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS. Dalam pemutakhiran data pemilih, PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 11 tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih di Dalam Negeri Dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemutakhiran data pemilih yaitu kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu atau Pemilihan Terakhir dan Mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi aktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten /kota dengan PPK dan PPS.

Menurut PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.

Pengertian data menurut Kuswadi dan Mutiara (2004), adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat. Sedangkan menurut *Webster New World Dictionary* (dalam Situmorang dkk, 2010) adalah sesuatu yang diketahui atau yang dianggap, diketahui artinya sudah terjadi merupakan fakta (bukti) dan dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan.

Berdasarkan penjelasan diatas kesimpulan pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih dengan mencocokkan data pemilih yang berasal dari DP4 dengan pemilih di Lokasi pemutakhiran data, yang dilakukan dengan melakukan verifikasi ke masyarakat secara langsung dan dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Tujuan dari pemutakhiran data pemilih adalah kebenaran dari

data pemilih yang tercatat setiap pemilih hanya di daftar satu kali, untuk memverifikasi kevalidan data yang memenuhi syarat,meninggal maupun yang pindah domisili.

b. Tugas dan Wewenang KPU saat Pemutakhiran Data

Adapun tugas dan wewenang KPU pada saat pemutakhiran data menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota yaitu :

- a) KPU/KIP kabupaten/kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) dengan menggunakan formulir A-KWK.
- b) Penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang dengan memperhatikan,
 - a. Tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan/desa atau sebutan lain
 - b. Memudahkan pemilih.
 - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- c) KPU/KIP kabupaten/kota menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :

- a. PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) melalui PPK dan PPS dalam bentuk *Hardcopy* dan
- b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*

2.2.3 Cara melakukan Pendataan

Tidak kalah pentingnya pada saat petugas melakukan pendataan harus didasari oleh petunjuk teknis, untuk menghindari kekeliruan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP untuk membantu KPU dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih. Adapun cara melakukan pendataan yang tertera pada Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 Pasal 11 ayat (6) yaitu :

1. Mencatat pemilih yang tidak memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK;
2. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;
3. Mencoret pemilih yang meninggal;
4. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
5. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI / POLRI.
6. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum menikah pada hari pemungutan suara.

7. Mencoret data pemilih yang dipastikan tidak ada keberadaanya setelah menkonfirmasi kepada keluarg,tetangga,dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
8. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
9. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom disabilitas dan;
10. Mencoret pemilih,yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

2.2.4 Syarat Menjadi Pemilih

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Seperti yang tertera di PKPU Nomor 2 tahun 2017

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- d. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat
- e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
- g. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat Warga Negara Indonesia tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

2.2.5 Cara Mengajukan Perbaikan Identitas

Sebelum menjadi data yang valid dan ditetapkan Menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara) masyarakat bisa mengajukan usulan perbaikan apabila ada anggota keluarganya memiliki kekeliruan identitas setidaknya 10 (sepuluh hari) setelah ditetapkan DPS yang akan diinformasikan oleh PPS yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berguna membantu KPU untuk memvalidasi data sebelum menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

- 1) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun
- 2) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Pemilih sudah meninggal dunia
- 4) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut
- 5) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
- 6) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih

Demikian usulan perbaikan tersebut bisa disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

Setelah usulan tersebut ditindak lanjuti dan diverifikasi kebenarannya kemudian KPU merekapitulasi kembali dengan data yang valid dan menjadi DPT untuk kemudian diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi

nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan jdih.kpu.go.id dan penghitungan suara Pemilihan serta proses pendistribusiannya

2.5 Definisi Konsep

Penulis mengajukan definisi konsep sebagai berikut:

- 1) Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu..
- 2) KPU adalah lembaga negara indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat namun bersifat independen,yang artinya tidak bisa dipengaruhi oleh pihak eksternal, KPU penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan yang bebas,umum,jujur dan adil.
- 3) Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih dengan mencocokkan data pemilih yang berasal dari DP4 dengan pemilih di Lokasi pemutakhiran data,yang dilakukan dengan melakukan verifikasi ke masyarakat secara langsung.

2.4 Pokok-Pokok Penelitian

Pokok-pokok penelitian merupakan definisi secara terperinci dari konsep-konsep yang telah diuraikan di atas. Salah satu fungsinya yaitu untuk memberi petunjuk bagaimana suatu variabel yang diteliti itu dapat diukur dengan Unit Analisis.

Penulis mengajukan pokok penelitian sebagai berikut :

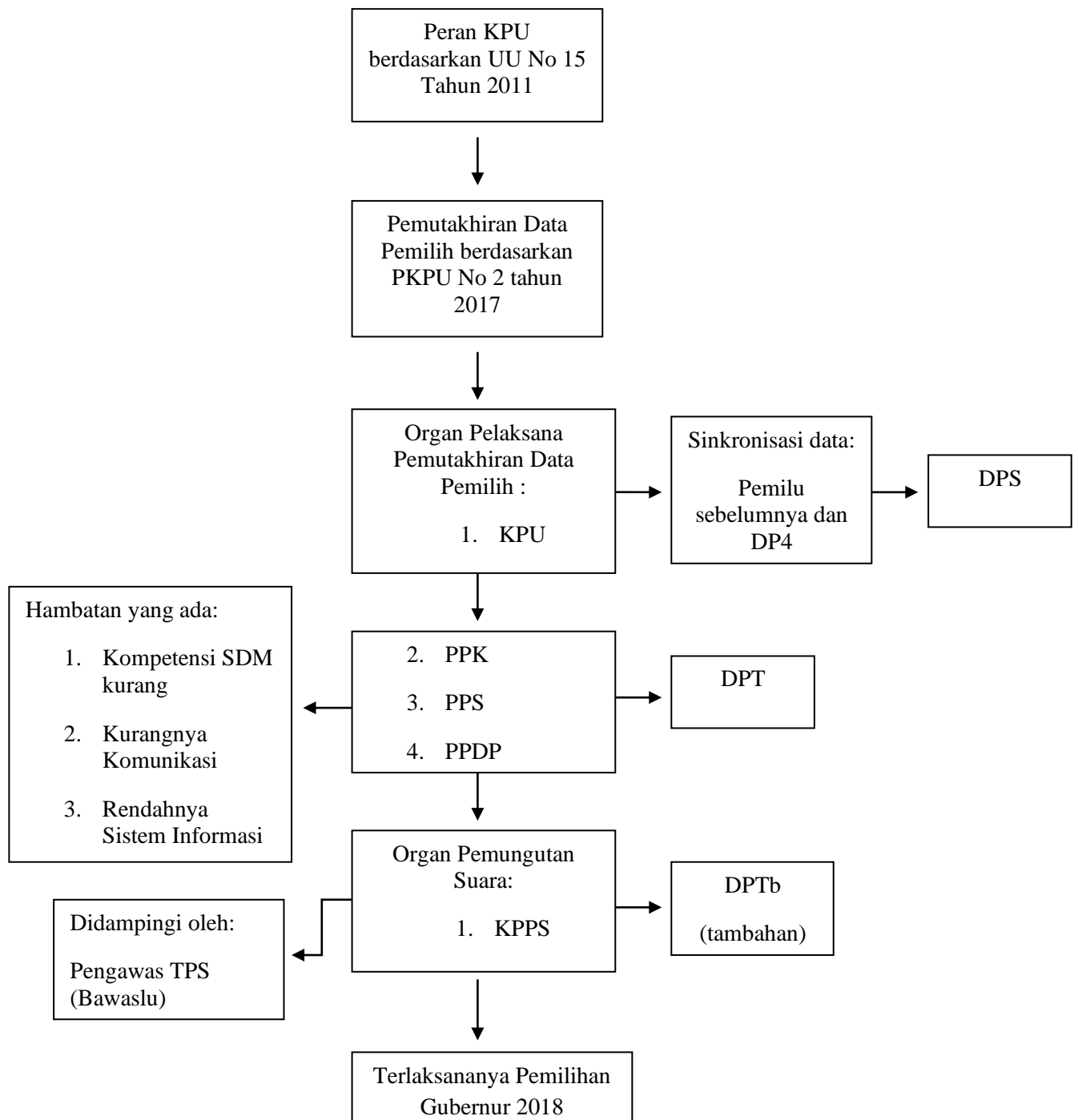
1. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dapat melaksanakan peranannya diukur/dicermati dari aspek-aspek berdasarkan peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (6) yaitu :

1. Mencatat pemilih yang tidak memenuhi syarat,tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK;
2. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;
3. Mencoret pemilih yang meninggal;
4. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
5. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI / POLRI.
6. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum menikah pada hari pemungutan suara.
7. Mencoret data pemilih yang dipastikan tidak ada keberadaanya setelah menkonfirmasi kepada keluarg,tetangga,dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
8. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
9. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom disabilitas dan;

10. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

2.5 Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai proses yang memuat langkah-langkah atau proses-proses urutan mengenai topik atau tema penelitian. Peranan peneliti sangat dominan dalam menentukan keberhasilan penelitian sedangkan alur pikir sifatnya hanya membantu mengarahkan proses penelitian agar berjalan dengan sistematis.



Gambar 2.1
Alur Pikir Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi, 2006:150). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:3) disebutkan bahwa secara umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh sebuah hasil yang dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran data. Menurut Sugiyono (2009:8) Metode penelitian ada dua jenis yaitu Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.

Penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sedangkan penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

3.2 Tipe Penelitian

Sugiyono (2006), membedakan penelitian tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi,serta analisis dan jenis datanya. Menurut tingkat eksplanasinya, Sugiyono (2006) mengelompokkan type penelitian menjadi :

a. Penelitian Eksplorer (Eksploratif)

Penelitian ini bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru mengenai gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis.

b. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan. Dalam bukunya Prof. Sugiono, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

c. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

d. Penelitian Asosiatif atau hubungan

Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan ke empat type penelitian diatas, type penelitian yang digunakan peneliti adalah type penelitian Deskriptif dengan metode Kualitatif, artinya penulis ingin mendeskripsikan,menggambarkan dan

menganalisis lebih mendalam mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur kabupaten pemalang tahun 2018.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2017:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah kata-kata tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukanya. Dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara tatap muka antara peneliti dengan informan. Peneliti akan mewawancarai Komisioner KPU dan Petugas Lapangan Seperti PPS dan PPDP Kabupaten Pemalang.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa surat-surat keputusan,data statistik catatan-catatan,arsip,laporan kegiatan,foto dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2018 khususnya kabupaten Pemalang.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2001:91) informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia “berkewajiban” secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal

Adapun Informan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Nama Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Aida Yuni Rakhmawati S.psi	Divisi Perencanaan data dan Infomasi
2	Makmur Sugiarti A.md	Pengolah Bahan dan Pemutakhiran Data dan Informasi
3	Saiful Bahri	Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Cibelok
4	Mujirun	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cibelok
5	Mustika Bkti Pratiwi	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cibelok

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:224) Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah mendapatkan data.

1. Observasi

Menurut Nasution, dalam Sugiyono (2018:226) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja menggunakan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda yang sangat kecil maupun sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.

Sedangkan menurut Sanafiah Faisal, dalam Sugiyono (2018:226) mengklarifikasi observasi menjadi, observasi partisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*over observation and covert observation*), dan observasi tidak terstruktur (*unstructured observation*).

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018:231) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri

pada self report atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Selanjutnya Esterberg, (2002) menyatakan bahwa interview merupakan hatinya penelitian sosial. bila anda lihat jurnal dalam ilmu sosial, maka anda temui semua penelitian sosial didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang dalam.

Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam Wawancara, yaitu wawancara Terstruktur, Semi-struktur dan tidak terstruktur.

c. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai ketrampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara.

d. Wawancara Semi-Struktur (*Semistructure Interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview* , di mana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancar jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat,dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara,peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemyukakan oleh informan.

e. Wawancara Tak Berstruktur (*unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan(Lifehistories),cerita,biografi.peraturan,kebijakan.

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

Berdasarkan pengertian diatas mengenai teknik pengumpulan peneliti akan menggunakan teknik wawancara Semi-struktur (*Semistructure Interview*) dan dokumen. Hal ini dikarenakan peneliti ingin menemukan masalah yang lebih terbuka dan kompleks serta dokumen sebagai data pendukung peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis Data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menintensiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain, menurut Moleong (2017:288), Analisis data pada penelitian kualitatif adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan dan penyederhanaan abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang

terjadi dalam catatan-catatan dengan tertulis. sebagaimana kita ketahui reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti akan melakukan reduksi data dengan cara data akan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Langkah utama dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data peneliti akan mewujudkan dalam bentuk foto, uraian dan gambar sejenisnya.

3. Penarikan/kesimpulan (concluding Drawing)

Dalam hal ini peneliti akan berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema hubungan persamaan hal-hal yang sering timbul hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Menurut Miles dan Huberman (2011: 252) mengemukakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan pengertian teknik analisis diatas peneliti akan menggunakan teknik reduksi data,hal ini lebih cocok terkait dengan teknik pengumpulan peneliti yaitu menggunakan wawancara semi struktur.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 DESKRIPSI WILAYAH

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai Utara Pulau Jawa. Secara Astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 109° 17'30"-109° 40'30" BT dan 8° 52'30"-8° 20' 11"LS.

Dari Semarang (Ibukota Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 km ke arah barat, atau jika ditempuh dengan kendaraan darat memakan waktu 2-3 jam. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km². Wilayah ini di sebelah utara berbatasan langsung dengan laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Purbalingga, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan kabupaten Tegal.

Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan pengunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur.

Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang, kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.



Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Pemalang

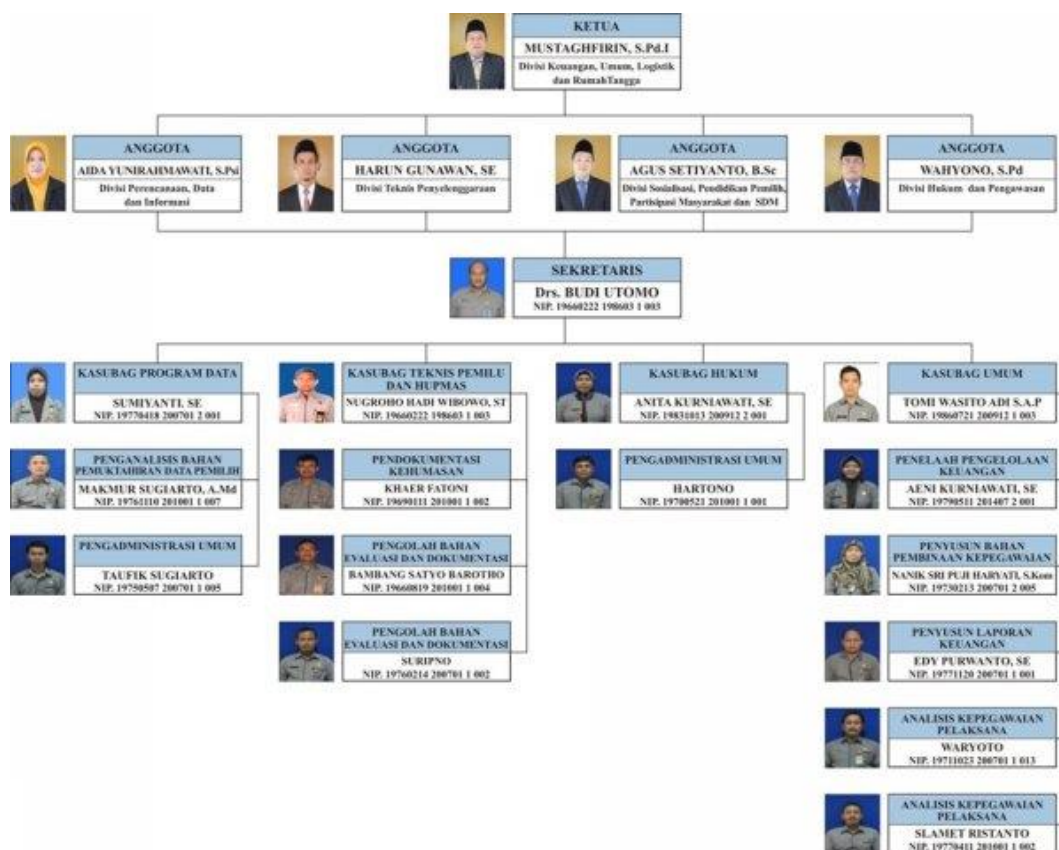
(sumber:

widiajiwibowo/<http://wdpemalang.blogspot.com/2011/11/pemalang.html>)

4.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang

Kantor KPU Kabupaten Pemalang provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Ahmad Yani Selatan No.59, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312, Indonesia. KPU Kabupaten Pemalang memiliki tugas sebagai lembaga pengatur, pengelola dan pelaksana pemilu untuk daerah Kabupaten Pemalang. Melalui kantor ini, pengurusan pemilu pada wilayah atau daerah diproses. Fungsi dan tugas KPU ini diantaranya merancang anggaran Pemilu, mengelola data pemilih, menjalin kerjasama dengan instansi lain terkait lokasi pemilihan umum, menyiapkan bahan kebutuhan pemilu seperti kursi tenda, mengumpulkan hasil pemilu, mengolah hasil pemungutan suara, menerima aduan terkait pemilu, melakukan sosialisasi pemilihan umum, menerima pendaftaran calon pemimpin daerah baik calon legislatif (caleg), bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakilnya, gubernur dan wakilnya dan jabatan politik lainnya.

4.2.1 Struktur Organisasi KPU kabupaten Pemalang



Gambar 4.2

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pemalang

(Sumber : kpu-pemalangkab.go.id)

4.2.2 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum memiliki visi “terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) misi (www.kpu.go.id), yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan wakil presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

4.2.3 Fungsi, Wewenang dan Tugas KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya KPU memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Perubahan dari UU no 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas dan wewenang tersebut adalah :

- a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD seperti :
 1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 2. Mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilu;
 3. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- b. Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil presiden seperti;
 1. Merencanakan program anggaran serta menetapkan jadwal;
 2. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 3. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

c. Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota seperti :

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah.
2. Mengordinasikan dan memantau tahapan pemilihan.
3. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan pada 5 Informan, 2 orang dari pegawai KPU dan 3 orang lainnya petugas lapangan yang melakukan pemutakhiran data pemilih. Peneliti lebih memfokuskan pada kedalaman informasi daripada besaran jumlah informan adapun ada 15 butir pertanyaan yang dibuat berdasarkan pokok-pokok penelitian.

Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan peneliti, penulis akan memberikan pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan kinerja Komisi Pemilihan umum kabupaten Pemplang. Informan dalam penelitian ini adalah; Aida Yuni Rahmawati S,pd anggota KPU di Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Makmur Sugiarto Anggota KPU sebagai Operator/Pelaksana, Saiful Bahri Ketua PPS Pilgub 2018 desa Cibelok, Mustika Bakti sebagai Petugas PPDP, Mujirun Petugas PPDP desa Cibelok kab. Pemplang.

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pemutakhiran data pada saat pemilu, Pemilihan Gubernur tahun 2018. (sumber: item nomor 1)

Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan, seperti pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan, beberapa jawaban dari Informan.

Penjelasan dari Ibu Aida Yuni Rahmawati, S.pd sebagai anggota KPU (Divisi Perencanaan Data dan Informasi) bahwa :

“pelaksanaan pemutakhiran Data dilaksanakan melalui 2 tahapan mulai dari pembentukan petugas PPK dan PPS yang kemudian dilanjutkan PPS untuk membentuk anggota PPDP, dan tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan pemutakhiran data itu sendiri, mulai dari penerimaan DP4 dari kemendagri ke KPU RI untuk kemudian DP4 disinkronkan dengan Daftar Pemilih Pemilu terakhir”.

Penjelasan dari Bapak Makmur Sugiarto anggota KPU sebagai Operator/pelaksana :

“Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih diawali dengan KPU Kabupaten/kota menerima DP4 dari KPU RI melalui KPU Provinsi untuk dilakukan Pemetaan TPS oleh PPK dibantu dengan PPS. Setelah dilakukan Pemetaan TPS menjadi Daftar Pemilih untuk dilakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selama 30 Hari dengan cara door to door”.

Sedangkan menurut Bapak Saiful selaku PPS tingkat desa yaitu :

“pelaksanaan pemutakhiran data diawali dengan perekrutan calon PPDP (petugas pemutakhiran data Pemilih), karena perekrutan belum secara terbuka melalui media sosial, maka pengumuman calon ppdp hanya diumumkan oleh kepala wilayah dusun masing-masing”.

Menurut bapak Mujirun selaku Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP):

“pelaksanaan pemutakhiran data cenderung lancar, mulai dari pendaftaran, pelantikan, diklat sampai masa bakti sebagai ppdp selesai aman terkendali”.

Sedangkan menurut pendapat Mustika Bakti P (petugas PPDP)

“pelaksanaanya di awali dengan pendaftaran,kemudian jadwal bimtek yang dilaksanakan secara berkala di Balai Desa Cibelok,kemudian diklat dan dilanjut mencoklit warga satu per satu kerumah”.

Berdasarkan jawaban Informan dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pelaksanaan Pemutakhiran Data melalui proses yang panjang dengan beberapa tahapan mulai dari penerimaan DP4 menjadi DPT sudah sesuai yang ada di PKPU nomor 2 tahun 2017. Semua elemen Pemutakhiran Data mulai KPU RI sampai petugas lapangan memiliki tupoksi masing-masing.

2. Siapa yang melaksanakan pemutakhiran data dari tingkat atas sampai tingkat bawah. (sumber: item nomor 2)

Untuk melaksanakan Pemutakhiran Data tidak bisa dipisahkan elemen satu dengan yang lainnya,karena proses yang panjang dan sangat terstruktur.

Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd (anggota KPU) menjelaskan:

”setelah sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih pemilu terakhir KPU menerima Kota/kabupaten Daftar pemilih yang diserahkan oleh KPU provinsi, maka pelaksana pemutakhiran data pada Pilgub 2018 dilakukan oleh KPU RI tingkat paling atas dan kemudian dibawahnya ada KPU Kota/kabupaten,PPK untuk tingkat kecamatan,PPS untuk tingkat desa dan PPDP petugas lapangan elemen paling bawah yang melakukan pemutakhiran data”.

Penjelasan Bapak Makmur Sugiarto (anggota KPU):

“Pelaksana Pemutakhiran Data Pemilih sangat Terstruktur dari KPU kabupaten/kota,PPK,PPS kemudian PPDP”.

Menurut Bapak Saiful Bahri sebagai Ketua PPS:

“pelaksanaan awal pemutakhiran data yaitu mulai dari KPU membentuk PPK dan PPS untuk kemudian PPS membentuk PPDP”.

Menurut bapak Mujirun Sebagai Petugas PPDP

"ya mulai dari KPU,PPK,PPS dan PPDP".

Pendapat lainnya dari Mustika Bakti P

"setau saya ya mulai dari KPU Kabupaten,kemudian PPK dan PPS terus PPDP".

Dapat disimpulkan bahwa pelaksana Pemutakhiran Data dari KPU kabupaten/kota,PPK dan PPS,PPDP dengan tupoksinya masing-masing sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2017.

3. bagaimana peran KPU dalam pemutakhiran data pemilih. (sumber: item nomor 3)

Dalam kondisi lapangan yang dinamis,terkadang memiliki berbagai hambatan. Penulis ingin mengetahui seperti apa Peran KPU dalam Pemutakhiran Data Pemilih

Menurut Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd yaitu :

"sudah jelas bahwa KPU memiliki peran yang sangat penting baik dari KPU RI,KPU Provinsi maupun Kota/kabupaten serta memiliki tugasnya masing-masing,untuk KPU kabupaten selain sinkronisasi data yang diterima dari KPU Provinsi, yaitu melakukan Pemetaan TPS dan membuat Daftar Pemilih/A-kwk sejumlah maksimal 800 per TPS sesuai dengan PKPU no 2 tahun 2017 dalam hal ini KPU dibantu oleh PPK dan PPS".

Sedangkan menurut Bapak Makmur Sugiarto (anggota KPU) yaitu:

"secara keseluruhan Peran KPU sangat penting, seperti melakukan bimbingan teknis kepada PPK untuk kemudian diteruskan PPK ke PPS mengenai proses coklit,formulir yang digunakan kemudian diunggah ke Aplikasi si DALIH guna ditetapkan menjadi DPS dan DPT".

Menurut Pendapat Bapak Saiful sebagai Ketua PPS :

“peran KPU disini adalah untuk menghimpun data yang dilaporkan oleh PPK berasal dari data lapangan oleh PPS dan PPDP”.
Sedangkan menurut Bapak Mujirun sebagai Petugas PPDP :

“peran KPU ya untuk membuat DPT yang lebih terbaru setelah saya keliling untuk memutakhirkan data”.

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran KPU sangat penting, koordinasi yang baik antara KPU dengan PPK dan PPS bisa memberikan penjelasan secara rinci baik secara data maupun teknis dilapangan kepada petugas PPDP.

4. Pada saat pelaksanaan pemutakhiran data apakah KPU melakukan pengawasan secara langsung kepada petugas. (sumber: item nomor 4)

Karena petugas PPDP merupakan elemen paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya perlu pengawasan karena tujuan Pemutakhiran Data untuk mendapatkan data yang valid dan komprehensif.

Penjelasan Ibu Aida Yuni Rahmawati S.pd (Anggota KPU) :

“kita mengawasi hanya beberapa tempat saja karena pengawasan bagian dari tugas bawaslu juga, tugas PPS mengawasi anggotanya dilapangan”.

Sedangkan penjelasan Bapak Makmur Sugiarto (Anggota KPU) :

“KPU Kabupaten melaksanakan pengawasan langsung terlebih apabila ada kendala dilapangan, di penyelenggara pemilu yang lain ada bawaslu Kabupaten dan jajaranya seperti Panwascam dan PPD”.

Menurut Bapak Saiful sebagai Ketua PPK Desa Cibelok

“KPU tidak mengawasi langsung lapangan, karena sudah ada PPK dan PPS kepanjangan tangan dari KPU. Pengawasan oleh KPU biasanya hanya monitoring sampling dibagian wilayah tertentu”.

Menurut Bapak Mujirun sebagai Petugas PPDP Desa Cibelok

“selama saya keliling rumah warga tidak pernah diawasi oleh KPU, tetapi diawasi oleh panwas desa dan PPS yang aktif berkoordinasi dengan saya”.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengawasan oleh KPU dilakukan beberapa tempatn yang mengalami kendala, dibantu dengan PPK dan PPS yang terus berkoordinasi. Bawaslu juga ikut serta dalam melakukan pengawan dibantu dengan Panwascam dan PPD.

5. Apakah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) aktif keliling mendatangi rumah warga atau menunggu warga mendatangi petugas.
(sumber: item nomor 5)

Bagi beberapa masyarakat mungkin awam dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Terlebih jika diminta menunjukkan identitas diri seperti KK dan KTP.

Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd menjelaskanbahwa :

“PPDP bekerja selama 30 hari setelah dilantik, dengan sistem kerja door to door kerumah warga untuk melakukan ccklit (pencocokan dan meneliti) data di A-kwk dengan identitas si pemilih”.

Bapak Saiful sebagai Ketua PPS desa Cibelok :

“sejak awal dibentuknya PPDP yaitu untuk memutakhirkan data pemilih,sudah pasti petugas yang mendatangi warga dari rumah kerumah dengan dibekali ATK dan rumah yang sudah didatangi petugas biasanya akan ditemplei stiker untuk menandakan bahwa rumah tersebut sudah di data oleh petugas.

Menurut Bapak Mujirun sebagai Petugas PPDP Desa Cibelok :

“saya yang mendatangi rumah warga kemudian meminta pemilik rumah untuk menunjukkan KK dan saya cocokan dengan DPT yang saya punya jika sudah dipastikan terdata saya menandai rumah warga dengan menempelkan stiker di pintu rumah pemilih”.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa secara teknis petugas aktif mendatangi rumah warga untuk kemudian diminta menunjukkan identitas diri seperti Fotocopy KK. Hal ini berarti petugas menggunakan sistem tselsel pasif.

Dengan demikian sebagaimana diuraikan di bab 2 bahwa stesel pasif adalah petugas pemutakhiran data pemilih aktif mendatangi rumah-rumah warga untuk mengecek apakah anggota keluarga sudah terdaftar sebagai pemilih, pemilih pemula atau ada anggota keluarga yang meninggal.

6. Apabila ada pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam A-kwk apa yang harus dilakukan. (sumber: item nomor 6)

Penjelasan Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd bahwa :

“sesuai dengan Peraturan KPU no 2 tahun 2018 bahwa pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar bisa menunjuka kartu identitas diri seperti Fotocopy KK ataupun KTP untuk kemudian diajukan sebagai pemilih tambahan”.

Bapak Makmur Sugiarto sebagai (Anggota KPU)

“harus dimasukkan ke form A-A.KWK atau pemilih tambahan baru dengan menyertakan data diri seperti fotocopy KK dan KTP”.

Bapak Saiful mengatakan sebagai Ketua PPS

“ jika ada pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam Akwk atau DPT petugas harusnya mencatat di form yang disediakan sebagai pemilih baru, dan pemilih menunjukan identitas diri seperti fotocopy KK dan KTP”. Menurut bapak Mujirun *“langsung saya catat di form pemilih baru, kemudian saya minta si pemilih menunjukan fotocopy KK dan KTP”.*

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa warga/masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tetapi sudah memenuhi syarat

seperti berusia 17 tahun atau sudah menikah,berdomisili di wilayah pada saat petugas datang dengan dibuktikan KTP dan Fotocopy KK dapat dimasukkan ke dalam pemilih baru. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan KPU nomor 2 tahun 2017.

7. Apabila terdapat kesalahan pada data pemilih apa yang harus dilakukan ?
(sumber: item nomor 7)

Pendapat dari Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd :

“jika terdapat kesalahan pada penulisan data maka dicoret kemudian perbaiki di kolom yang tersedia”

pendapat dari bapak Makmur Sugiarto :

“harus diperbaiki baik disesuaikan dengan identitas warga baik dari KK maupun KTP”.

Menurut bapak Saiful Bahri :

“setelah dicocokkan dengan identitas si pemilih maka diperbaiki,dengan cara dicoret pada kolom yang terdapat masalah dan ditulis kembali pada kolom yang kosong dengan jelas”.

Pendapat Bapak Mujirun selaku petugas lapangan :

“dicoret tabel yang ada kesalahan kemudian dicatat ulang pada kolom yang kosong”

Menurut Mustika Bakti P :

“harus di crosscheck terlebih dahulu apa dengan KTP/KK warga kemudian di perbaiki dengan cara dicoret pada kolom yang salah dan ditulis ulang”

Dari jawaban informan atas pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa data yang salah harus diperbaiki oleh petugas tetapi dicrosscheck terlebih dahulu dengan identitas si Pemilih.

8. Apa yang dilakukan anda apabila ada pemilih yang meninggal,pindah domisili atau tidak dikenal. (sumber: item nomor 8)

Kondisi lapangan yang dinamis kadang membuat petugas mengalami beberapa kesulitan. Seperti apa yang dilakukan KPU maupun petugas menangani hal tersebut.

Pendapat Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd adalah :

“jika pemilih termasuk dalam tidak memenuhi syarat setelah dipastikan kebenarannya maka bisa dicoret satu garis penuh dan memberikan keterangan di tabel yang disediakan”.

Menurut Bapak Makmur Sugiarto (Anggota KPU) yaitu :

“Apabila ada pemilih yang meninggal dicoret diberi keterangan meninggal atau kode sesuai arahan, apabila ada pemilih yang akan pindah domisili/tugas ditempat lain maka pemilih harus mengajukan ke PPS atau kabupaten untuk segera di proses menggunakan form A4 KWK dan dimasukkan kedalam form A.5 KWK sebagai pindah memilih (DPPH),syarat untuk Pindah Tempat Memilih yaitu sudah terdaftar dalam DPT di domisili sebelumnya”.

Bapak Saiful Ketua PPS Desa Cibelok mengatakan :

“langsung dicoret nama pemilih yang meninggal,pindah domisili dan diberi keterangan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai kode yang ada di DPT. Untuk warga yang tidak dikenal sebaiknya dipastikan dulu kepada tetangga atau RT setempat keberadaan si pemilih, apabila tidak ada maka dicoret nama pemilih dan diberi keterangan tidak memenuhi syarat”.

Bapak Mujirun Petugas PPDP Desa Cibelok menjelaskan

“Pemilih yang meninggal dicoret, dan untuk yang pindah domisili setelah dipastikan tidak ada oleh tetangga sekitar maka dicoret”.

Dalam penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemilih yang meninggal,maupun pindah domisili dicoret penuh dari Daftar Pemilih sesuai tahapanya. Hal ini sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2017.

9. Apabila ada pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tapi terdaftar dalam A-kwk apa yang anda lakukan. (sumber: item nomor 9)

Menurut Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd yaitu :

”di dalam peraturan KPU sudah jelas bahwa yang syarat menjadi pemilih adalah berusia minimal 17 Tahun atau sudah menikah,berdomisili di tempat pemilihan dengan menunjukkan kartu tanda pengenal seperti KTP maka hal-hal yang tidak berkaitan dengan tadi maka tidak bisa menjadi pemilih atau dicoret dari Daftar Pemilih”.

Sedangkan Menurut Bapak Makmur Sugiarti (Anggota KPU) :

“ya dicoret dari Daftar Pemilih dengan keterangan tidak memenuhi syarat”.

Menurut Bapak saiful sebagai Ketua PPS desa Cibelok :

“apabila ada pemilih yang belum cukup usia tapi terdaftar dalam DPT maka petugas harus mencoret nama tersebut dengan memberi keterangan tidak memenuhi syarat”.

Menurut bapak Mujirun sebagai Petugas PPDP :

“jarang terjadi bahkan tidak pernah selama saya menjadi petugas tapi himnbauan dari PPS bahwa hanya yang berusia 17 tahun keatas yang berhak menjadi pemilih dengan syarat menunjukkan identitas diri seperti KK dan KTP apabila ada yang terdaftar tetapi belum memenuhi batas usia yang ditentukan maka dicoret dari daftar pemilih”.

Berdasarkan keterangan diatas disimpulkan bahwa batas minimal usia untuk menjadi pemilih adalah 17 tahun atau sudah menikah, jika ada petugas menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat maka dicoret dari Daftar Pemilih, hal ini sudah di sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2017.

10. Apabila ada anggota TNI/POLRI terdaftar sebagai pemilih apa yang anda lakukan. (sumber: item nomor 10)

Penjelasan Ibu Aida Yuni Rahmawati S,Pd yaitu :

“masih berkaitan dengan peraturan KPU nomor 2 Tahun 2017 bahwa syarat menjadi pemilih salah satunya tidak beranggota sebagai TNI/POLRI,apabila terdapat di DPT yang beranggota TNI/POLRI maka harus dicoret penuh, sebaiknya juga warga melapor apabila ada anggota keluarganya yang baru menjadi TNI/POLRI hal ini akan lebih memudahkan petugas”.

Menurut bapak Saiful Sebagai Ketua PPS desa Cibelok

“apabila ada anggota TNI/POLRI maka nama tersebut harus dicoret dari daftar pemilih, dan sebaiknya memang kesadaran warga yang memiliki anggota keluarga untuk melaporkan kepada petugas”.

Menurut bapak Mujirun sebagai Petugas PPDP

“harus dicoret dari daftar pemilih kemudian diberi keterangan tidak memenuhi syarat. Biasanya anggota keluarga yang merasa sebagai TNI/POLRI melaporkan ke saya”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan TNI/POLRI tidak diperkenankan menggunakan hak pilih, maka petugas harus memastikan bahwa DPT bersih dari anggota TNI/POLRI. Hal ini sudah sesuai dengan PKPU no 2 tahun 2017.

11. Apabila ada pemilih yang tidak dapat ditemui pada saat akan di data apa yang harus dilakukan ? (sumber: item nomor 11)

Menurut Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd :

“pemilih yang tidak dapat ditemui pada saat petugas datang dan sudah dipastikan bahwa pemilih tidak dirumah sebaiknya dicoret dari daftar pemilih”

Menurut Bapak Makmur Sugiarto :

“pemilih dicoret dari daftar pemilih apabila dipastikan tidak ada keberadaanya”

Menurut bapak Saiful Bahri :

“Ya harusnya dicoret dari Daftar Pemilih,tetapi keadaan dilapangan biasanya tidakseperti itu karena merasa kenal dengan warga tersebut maka tetap di data dan dititipkan kepada tetangga”

Menurut bapak Mujirun :

“kalo saya kenal dan dia warga asli disitu saya tetap mendata terus saya titipkan pada tetangga sekitar. Ada atau tidaknya warga tersebut”

Menurut Mustika Bkti P :

“apabila pemilik data tidak dapat ditemui dan ternyata sudah pindah atau merantau itu dicoret”

Dapat diambil kesimpulan bahwa secara teknis pada pemilih yang tidak dapat ditemui masih ada yang belum melakukan sesuai arahan dari KPU. Hal ini perlu dibimbing lagi oleh KPU pada saat bimbingan Teknis (Bimtek).

12. Apabila ada pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya karena alasan hukum tertentu tetapi terdaftar dalam Fom A-kwkapa yang dilakukan ?
(item nomor :12)

Menurut ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd :

“tetap dicoret apabila ditemui dilapangan bahwa ada pemilih yang memiliki kasus hukum kemudian sedang dicabut hak pilihnya”

Menurut bapak Makmur Sugiarto :

“petugas tetap mencoret sesuai arahan yang diberikan oleh KPU”

Menurut bapak Saiful Bahri :

“tidak ada sih arahan seperti itu,karena juga jarang terjadi”

Pendapat Bapak Mujirun:

“belum pernah terjadi ya karena kan kita juga tidak tahu apakah warga tersebut memiliki rekam jejak hukum yang jelek. Kasus seperti ini belum ada dan tidak diterangkan oleh PPS”.

Sedangkan pendapat Mustika Bekt P:

“Selama saya jadi petugas lapangan belum pernah terjadi dan saya baru dengar ada aturan tersebut karena PPS tidak pernah menerangkan “

Penulis dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat antara KPU dengan petugas lapangan sehingga secara teknis belum Optimal.

13. Bagaimana upaya anda bagi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya. (sumber: item nomor 13)

Penyandang disabilitas pasti juga mempunyai hak pilih yang sama, akan tetapi tidak semuanya dapat menggunakan hak nya. Seperti apa upaya penyelenggara dari KPU maupun petugas.

Jawaban Ibu Aida Yuni Rahmawati S,pd (Anggota KPU)

“sebaiknya petugas tetap mendata pemilih penyandang disabilitas agar kami dari pihak KPU mengusahakan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya”.

Pendapat Bapak Sugiarto sebagai Anggota KPU :

“ada formulir template dan pendampingan guna lebih memaksimalkan penyandang difabel menggunakan hak pilihnya”.

Penjelasan Bapak Saiful Bahri sebagai Ketua PPS desa Cibelok:

“selama ini tidak ada penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu, ketika ada kami tetap menghimbau petugas untuk tetap mendata siapa saja yang penyandang disabilitas”.

Jawaban dari Bapak Mujirun Sebagai petugas PPDP:

“tergantung kondisi jika sekiranya terlalu sulit untuk datang ke TPS seperti perlu alat bantu tidak saya masukkan, tidak tega”.

Menurut MustikaBekt P (Petugas PPDP) :

”dilihat dari kondisinya dahulu, perlu ijin anggota keluarga lain juga apa perlu memilih dan alat bantu. Jika tidak diijinkan dan sekiranya lokasi TPS lumayan jauh maka tidak dimasukkan”

Berdasarkan dari penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya apabila petugas Pemutakhiran Data memasukkan ke formulir yang disediakan.

Melihat kondisi dan faktor letak TPS petugas kadang enggan memasukkan ke formulir khusus untuk penyandang disabilitas.

14. Apabila ada pemilih yang terdaftar dalam A-kwk tetapi berdasarkan Identitas KTP/KK bukan warga asli daerah tempat petugas mendata, apa yang dilakukan ?

Menurut Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd :

“jika ditemui ada warga yang bukan penduduk asli daerah petugas mendata, maka petugas mencoret dan diberi keterangan tidak memenuhi syarat”

Menurut Bapak Makmur Sugiarto *“tetap dicoret dan diberi tanda TMS”*

Menurut Bapak Mujirun *“dicoret dari daftar A-kwk dna diberi keterangan tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih”*

Berdasarkan Keterangan dari Petugas dapat penulis simpulkan bahwa point pemilih yang bukan warga asli penduduk tersebut tidak didata oleh petugas sesuai dengan PKPU no 2 tahun 2018.

15. Berdasarkan data pemilih tambahan jumlahnya cukup tinggi mencakup semua kecamatan di kab.pemalang , menurut anda mengapa demikian.
(sumber: item nomor 15)

Dari data KPU pada Pilgub 2018 menunjukkan angka yang cukup tinggi se Kabupaten Pemalang, hal ini membawa penulis ke pertanyaan tersebut.

Menurut Ibu Aida Yuni Rahmawati S,pd :

“karena dinamisasi perpindahan penduduk yang tidak ketahuan, bisa pada saat petugas mendatangi salah satu rumah warga tidak dirumah, kecermatan petugas dalam melakukan ccklit sangat penting, karena DPT sumbernya dari DP4 beberapa terjadi kasus nama-nama yang sudah tidak tercatat bahkan muncul kembali”.

Menurut Bapak Makmur Sugiarto (Anggota KPU) yaitu :

“banyak warga yang belum ber KTP elektronik, baru di urus ketika menjelang hari pemungutan suara”

Menurut Bapak Saiful Bahri (Ketua PPS) :

“itu memang terjadi setiap tahapan setiap pemilu dengan alasan pada saat PPDP keliling biasanya diluar kota,pada saat di data karena pemilih tidak ada biasanya dihapus diberi keterangan pindah domisili atau tidak dikenal,karena tidak dapat ditemui pada saat di ccklit. Biasanya perantauan yang mengalami hal tersebut”.

Menurut Bapak Mujirun sebagai Ketua PPDP :

“karena pada saat saya datang pemilik rumah tidak ada atau anggota keluarganya ada yang perantauan,ada juga yang sudah mengurus KTP tapi belum jadi biasanya pemilih baru yang baru berusia 17 tahun”.

Pendapat Mustika Bkti P (petugas PPDP) :

“karena pada saat petugas datang rumah tersebut kosong,atau ada anggota keluarga yang merantau, ada juga yang belum mempunyai KTP jadi tidak di data oleh petugas. Ketika hari H ternyata warga tersebut sudah mengurus akhirnya didata sebagai Pemilih Tambahan”.

Berdasarkan pendapat para Informan penulis menarik kesimpulan penyebab banyaknya Jumlah Pemilih Tambahan dikarenakan dinamisasi perpindahan penduduk yang tidak diketahui, belum mengurus KTP-E, juga karena masyarakat kurang informasi adanya tenggang waktu bagi warga

masyarakat yang ingin mengajukan usulan atau perbaikan yang dilaksanakan 10 hari setelah ditetapkan DPS. Masyarakat jarang mengetahui bahwa PPS desa membuat pengumuman di balai Desa atau ditempat Umum yang strategis.

16. Menurut anda siapa yang berperan penting dalam memutakhirkan data sehingga jumlah pemilih tambahan tidak banyak ? mengapa demikian ?
(sumber: item nomor 16)

Semua panitia pelaksana pemutakhiran data pasti memiliki peran pentingnya masing-masing, akan tetapi pasti ada bagian tertentu yang sangat vital dalam memutakhirkan data. Siapa peran tersebut dan mengapa.

Pendapat Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd (Anggota Kpu):

“sebagai elemen paling bawah yang berkaitan langsung dengan warga PPDP merupakan peran penting pelaksanaan Pemutakhiran Data, ketepatan dan kecermatan petugas sangat diutamakan agar menghasilkan data yang valid dan mutakhir sehingga warga yang sudah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya”.

Sedangkan Menurut Bapak Sugiarto (Anggota KPU):

“Semua jajaran penyelenggara pemutakhiran data terutama PPDP,PPS dan PPK, juga di Badan Pengawasan Pemilu mulai dari PPD dan Panwascam semuanya sangat berperan penting”.

Menurut Bapak Saiful Ketua PPS :

“koordinasi yang baik antara PPK,PPS dan PPDP,kemudian koordinasi juga dengan RT/RW setempat lebih memudahkan petugas dilapangan karena lebih mengenal wilayah sendiri. Jadi yang lebih berperan penting adalah kita sebagai petugas lapangan”.

Menurut Bapak Mujirun sebagai petugas PPDP :

“peran penting ada pada petugas yang lebih mengenal wilayah kerjanya, terutama di wilayah sendiri”.

Sedangkan menurut Mustika Bakti P (Anggota KPU) :

“Saya sendiri merasa berperan penting dalam memutakhirkan data karena saya ditugaskan oleh KPU untuk membantu validasi data dengan yang ada dilapangan jadi saya harus ikut berkontribusi dalam suksesnya PPDP ini”.

Berdasarkan Pendapat diatas bahwa setiap elemen penyelenggara Penyelenggara Pemutakhiran Data mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing, semua merasa memiliki peran yang sangat penting dalam berkontribusi mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih. Maka dari itu penting bagi penyelenggara untuk sama-sama berkoordinasi dengan baik.

17. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam melakukan pemutakhiran data ?

(sumber: item nomor 17)

Karena objek dari pemutakhiran data ini adalah masyarakat maka perlu partisipasi masyarakat perlu diperhatikan, bagaimanapun masyarakat juga mempunyai peran penting.

Menurut Bapak Saiful Bahri Sebagai Ketua PPS desa Cibelok :

“sambutan masyarakat cukup baik, bisa memberikan informasi juga keberadaan tetangga atau salah satu anggota yang tidak dirumah atau pindah domisili. Masyarakat cukup membantu petugas dalam hal ini”.

Menurut Bapak Mujirun sebagai petugas PPDP :

“Baik sekali, bisa mengarahkan rumah warga yang saya tidak tau atau tidak saya kenali. Mau menunjukkan identitas diri seperti KK dan KTP”.

Sedangkan menurut Mustika Bakti P (Petugas PPDP) :

“Partisipasinya cukup baik, karena saya bekerja di wilayah sendiri saya mengenal tetangga saya sendiri, mau berbagi informasi juga”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan masyarakat ikut berperan dalam jalanya Pemutakhiran Data Pemilih, seperti memberikan informasi seputar tetangga, atau warga pindahan dan sebagainya, koordinasi seperti inilah yang memudahkan petugas dalam bekerja.

18. Apa kendala atau hambatan dilapangan pada saat melakukan pemutakhiran data ? (sumber: item nomor 18)

Menurut kendala yang di alami Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd

“lebih ke secara sistem pada aplikasi karena digunakan serentak sekabupaten Pemalang, sering error, tentunya kendala ini berbeda dengan yang dialami dilapangan”.

Menurut Bapak Makmur Sugiarto(Anggota KPU) :

“Petugas tidak diijinkan melihat identitas kependudukan untuk di Data, masyarakat tidak tahu cara mengajukan usulan perubahan status”.

Menurut Bapak Saiful sebagai Ketua PPS desa Cibelok :

“ini kebalikan dari partisipasi masyarakat,terkadang masyarakat apatis sudah merasa terdaftar sebagai pemilih tidak mau menunjukan identitas diri yang akhirnya petugas tidak bisa mencocokkan dengan yang ada di A-kwk, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemutakhiran data,mengharapkan bantuan apabila kita meminta menunjukan identitas diri”

Menurut Bapak Mujirun sebagai petugas PPDP :

“tidak mau menunjukan Fotocopy KK jadi kita mendata seadanya hanya berbekal A-kwk dan kepercayaan si pemilih bahwa nama tersebut sudah benar”.

Sedangkan Menurut Mustika B (Petugas PPDP) :

“ya tidak mau menunjukan Fotocopy KK dan KTP, masyarakat cenderung cuek apabila diminta keterangan data”.

Berdasarkan Pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Pemutakhiran Data, apa itu Pemutakhiran Data dan Pentingnya terdaftar dalam DPT sehingga masyarakat akan lebih terbuka mengenai data diri dan tidak mengharapkan bantuan seperti yang dikeluhkan oleh petugas. Kesimpulan lain pada sistem yang kurang upgrade sehingga bisa digunakan serentak dengan kapasitas pengguna yang banyak apabila jika menjelang pemilu atau pilkada serentak.

19. Sebagai panitia pelaksana pemutakhiran data apa harapan anda untuk pemilu yang akan datang. (sumber: item nomor 19)

Banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pastinya semua penyelenggara mengharapkan perbaikan di pemilu yang akan datang.

Pendapat Ibu Aida Yuni Rahmawati.S,pd :

“harapanya ada regulasi bahwa sumber DPT dapat dari Daftar Pemilu Terakhir bukan dari DP4 karena lebih efektif dilapangan,meminimalisir jumlah pemilih tambahan ,serta secara umum Pemutkahiran Data pada pemilu yang akan datang dilaksanakan lebih Komprehensif,akurat dan detail”.

Pendapat Bapak Makmur Sugiarto (Anggota KPU) :

“Saya sebagai operator/pelaksana di KPU berharap jadwal tahapan pemutakhiran Data tidak berdekatan, Optimalisasi Aplikasi di Dalih agar dapat digunakan serentak pada saat hari H, Peraturan KPU agar tidak sering mengalami Perubahan”.

Harapan Bapak Saiful Bahri Sebagai ketua PPS desa Cibelok :

“lebih intensif lagi komunikasi antara PPK,PPS dan PPDP,sosialisasi lagi yang lebih luas,Petugas diharapkan berasal dari daerah sendiri yang lebih menguasai wilayahnya sendiri”.

Menurut Bapak Mujirun petugas PPDP :

“Pembekalan yang cukup pada saat bimbingan teknis,sosialisasi oleh KPU pada masyarakat agar masyarakat tau apa itu pemutakhiran data serta pentingnya menggunakan hal pilih,salah satunya pada tahapan pemutakhiran data”.

Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan sebagai Anggota KPU mengharapkan regulasi yang jelas mulai dari Daftar Pemilih berdasarkan DPT pemilu terakhir, kemudian teknis pelaksanaan, serta sistem yang optimal agar dapat digunakan serentak. Sebagai petugas lapangan berharap akan adanya Sosialisasi dari Pihak KPU secara menyeluruh untuk masyarakat tentang pemutakhiran data agar dapat bekerjasama dalam mensukseskan jalannya pelaksanaan Pemutakhiran DataPemilih yang akan datang.

5.2 Pembahasan atas Penelitian

Pada penelitian penulis menyimpulkan berdasarkan wawancara pada kelima Informan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum melakukan perannya dengan semestinya. Pelaksanaan Pemutakhiran Data dengan aturan yang berlaku yaitu PKPU Nomor 2 tahun 2017 belum dilakukan secara maksimal diantaranya pemilih yang tidak dapat ditemui,dan pemilih yang dicabut hak pilihnya tetap didata oleh petugas. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan yang ada.

Selain itu KPU melaksanakan Pemutakhiran Data mulai dari penerimaan DP4 dari Kemendagri oleh KPU RI yang kemudian di Sinkronisasi lagi dengan DPT pemilu terakhir oleh KPU Provinsi dan diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota, KPU juga melakukan Pemetaan TPS yang dibantu oleh PPK dan PPS, setelah itu membuat Daftar Pemilih dibagi per TPS maksimal 800 orang, hal ini sudah dilaksanakan dengan maksimal sesuai Undang-undang yang berlaku.

Pada jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 4.338, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 informan yang terdiri dari 2 orang KPU dan 3 orang lainnya petugas lapangan, Daftar Pemilih Tambahan berjumlah banyak karena banyaknya dinamisasi perpindahan penduduk yang tidak dapat terkendali, juga kemudian karena perpindahannya tidak diketahui atau belum melapor ke balaidesa, alasan lainnya karena tidak/belum memiliki KTP-E sehingga tidak bisa didata oleh petugas, setelah proses Pemutakhiran Data selesai dan PPS mengumumkan hasil DPS (Daftar Pemilih Sementara), PPS juga memberikan tenggang waktu 10 hari untuk masyarakat memberikan usulan apabila ada perubahan atau perbaikan identitas, namun kenyataannya hal ini tidak banyak diketahui masyarakat sehingga pada hari pemungutan suara banyak yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP-E, jadi petugas memasukkannya menjadi DPTb. Artinya kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tenggang waktu yang diberikan PPS, bisa dikarenakan partisipasi masyarakatnya yang rendah atau sosialisasi KPU yang kurang. Penyelenggara Pemutakhiran Data dari KPU Kabupaten/kota sampai ke PPDP memiliki peran penting masing-masing tidak dipungkiri mereka merasa wajib

memberikan kontribusi yang baik sehingga Pemutakhiran Data berjalan dengan baik.

Setiap penyelenggara Pemutakhiran memang mempunyai peran penting tersendiri sesuai dengan tupoksinya, akan tetapi partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk memudahkan petugas dalam mencoklit sehingga Pemutakhiran Data berjalan dengan baik dan meminimalisir banyaknya jumlah Pemilih Tambahan (DPTb).

Hasil penelitian lapangan juga menemukan beberapa kendala yang dialami oleh penyelenggara KPU, seperti Sistem si Dalih yang digunakan KPU, PPK dan PPS untuk mengupload Daftar Pemilih sering mengalami *Error* hal ini dikarenakan Aplikasi digunakan serentak. Temuan lainnya yaitu dialami oleh petugas lapangan karena masyarakat belum mengenal apa itu Pemutakhiran Data, mereka enggan untuk memberikan Informasi atau menunjukkan identitas diri walaupun mau mereka mengharapkan suatu imbalan seperti Bantuan Sosial (Bansos) terlebih jika petugas bukan warga di domisili tersebut, masyarakat yang acuh terhadap petugas tentunya menjadi kendala tersendiri bagi petugas lapangan.

Banyaknya problematika yang dialami oleh penyelenggara Pemutakhiran Data Pemilih, tentunya mereka mengharapkan perbaikan di Pemilu yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti merangkum semua harapan-harapan Informan untuk bisa dijadikan solusi pada pemilu selanjutnya.

Pertama yaitu melihat banyaknya jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam DPT, ada regulasi

tentang penerimaan Daftar Pemilih berdasarkan DPT pemilu terakhir agar lebih efektif dan memudahkan petugas lapangan.

Kedua, jadwal tahapan Pemutakhiran Data Pemilih agar tidak berdekatan sehingga penyelenggara dapat mempersiapkan dengan maksimal, Optimalisasi Aplikasi si Dalih untuk kedepan nya menjadi lebih baik seperti dapat digunakan serentak seluruh indonesia dan tidak terlalu sering mengganti PKPU ataupun undang-undang.

Ketiga yaitu KPU lebih sering mengadakan sosialisasi pada masyarakat secara berkala, memberikan informasi tentang Pemutakhiran Data baik melalui sosial media atau secara langsung, pada saat menjelang pelaksanaan Coklit Bimtek lebih sering dilakukan dan terakhir yaitu membangun koordinasi yang baik antara Penyelenggara Pemutakhiran Data Pemilih dan Masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Peran KPU secara keseluruhan belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Secara teknis pemutakhiran data belum maksimal. Akan tetapi tahapan dari penerimaan DP4 sampai ke tahap penetapan DPT sudah dilakukan dengan baik oleh KPU dan sesuai dengan Undang-undang. Tentu saja peran KPU sangat penting dilihat bagaimana sederet tahapan pemutakhiran data akan bermuara ke KPU. KPU juga tidak bekerja sendiri tetapi dibantu oleh petugas lapangan seperti PPK,PPS dan PPDP yang bekerja seperti sistem. Apabila salah satu dari sistem tersebut tidak bekerja dengan baik atau sinkron maka hasil yang akan diterima oleh KPU juga tidak valid. Maka dari itu pula ketika bimbingan teknis dilakukan oleh KPU kepada PPK penting untuk menjelaskan dan memberikan arahan terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data dilapangan secara jelas dan rinci,sehingga PPK juga dapat menjelaskan pada PPK maupun PPDP dengan sangat jelas dan rinci pula.

2. Kendala-kendala yang tentunya ada baik dari KPU maupun petugas lapangan. Dapat disimpulkan oleh peneliti yang pertama, Kurangnya Partisipasi Masyarakat yang dikarenakan rendahnya Sumber Daya Manusia terutama pada pengetahuan masyarakat mengenai Pemutakhiran Data Pemilih menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), seperti pada saat PPS memberikan Informasi pengumuman DPS di Balaidesa, maupun di papan Informasi dan respon masyarakat yang sedikit sehingga daftar Pemilih Tambahan (DPTb) banyak. Kedua, kurangnya Komunikasi atau koordinasi yang baik antara KPU dengan Petugas. Karena KPU memberikan arahan yang kurang jelas kepada Petugas sehingga terjadi *Missed Communication*. Ketiga, Rendahnya sistem Informasi seperti aplikasi si Dalih yang tidak dapat digunakan serentak. Menghambat petugas mengupload hasil Pemutakhiran Data.
3. Solusi yang dilakukan pertama, meningkatkan Partisipasi masyarakat dengan cara sosialisasi tentang Pemutakhiran Data menjelang pemilu, guna merespon petugas pada saat didatangi rumahnya maupun pada saat pengumuman DPS. Kedua, memperbaiki komunikasi atau koordinasi baik dari KPU, PPK, PPS agar pada saat Bimtek KPU menjelaskan semua tugas PPDP sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketiga optimalisasi aplikasi si Dalih agar dapat digunakan serentak dan lebih efisien daripada harus merekap data manual.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi (saran) sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Pemalang dalam hal ini meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan untuk melibatkan masyarakat sebagai control public terutama dalam penyusunan daftar pemilih yang memang dianggap sebagai salah satu output terpenting dalam tahapan pemilu.
2. KPU Kabupaten Pemalang dalam hal ini selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Petugas Lapangan seperti PPK,PPS dan PPDP terkait dan stakeholder terutama dalam penyusunan daftar pemilih yang penulis anggap masih terdapat masalah.
3. KPU Kabupaten Pemalang untuk pemilu berikutnya akan ada sistem Informasi yang memudahkan Petugas dalam mendata masyarakat agar lebih mudah dan efisien.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

Abdullah, Rozali (2009) *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Arikunto, Suharsimi,(2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Budiardjo, Miriam (2008) tentang *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Soekanto,Soerjono.(2016). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Marijan,Kacung (2010) tentang *Sistem Politik Indonesia,Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*,Jakarta :Kencana,Prenada Media Group

M taupan (1989) *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika

Miftah Thoha, (1997), *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: CV.Rajawali

Miles,M.B, Huberman,A.M dan Saldana (2014) *Qualitative Data Analysis,A Methods Sourcebook*, USA:Sage Publications, Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi,UI-Press

Kuswadi dan Mutiara Erna (2004),*Delapan Langkah dan Tujuh Alat Statistika Untuk Peningkatan Mutu Berbasis Komputer*, Jakarta : PT.Alex Media Komputindo

Lexy J,Moleong (2017).*Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset

Situmorang, Syafrizal Helmi.(2008).*Analisis Data Penelitian*.Medan:USU Press

Soekanto,Soerjono.(2016). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Sugiyono, (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Jurnal :

Nugraha,Sari,Ningsih,Ramdani (2020). *Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Dalam Pemutakhiran Data*. dimuat Datin Law Jurnal

Rahmad Nuryadi (2017).*Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015*. Dimuat JOM fisip Vol.4 no 2

Delvani (2018).*Pelaksanaan Undang-undang Nomo 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada tahun2018)*. Dimuat di Jurnal Al-Dustur Vol.1 Nomor 1

Novianty,Octavia (2018).*Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Menumbuhkan PartisipasiPolitik Bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat*. Di muat di Jurnal Sosial Horizon Jurnal Pendidikan Vol.1 No 2

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota.

Sumber-sumber Lain :

(sumber:widiajiwibowo/http://wdpemalang.blogspot.com/2011/11/pemalang.htm)

kpu-pemalangkab.go.id (diakses Kamis,24 Desember 2020)

www.pemalangkab.go.id (di akses Kamis,24 Desember 2020)

jdih.kpu.go.id (di Selasa akses 27 Oktober 2020)s

Daftar Singkatan

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu

Coklit : Pencocokan dan Penelitian

DP4 : Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

DPS : Daftar Pemilih Sementara

DPT : Daftar Pemilih Tetap

DPTb: Daftar Pemilihan Tambahan

KPU : Komisi Pemilihan Umum

KTP : Kartu Tanda Penduduk

NIK : Nomor Induk Kependudukan

PPDP : Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih

PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan

PPS : Panitia Pemungutan Suara

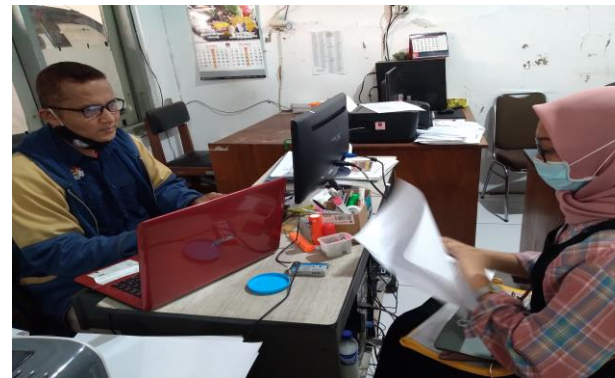
SIDALIH : Sistem Informasi Daftar Pemilih

TPS : Tempat Pemungutan Suara

UU : Undang-Undang

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA PADA INFORMAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Judul Penelitian

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pemalang Tahun 2018

2. Petunjuk Wawancara

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, peneliti memohon Partisipasi Bapak /Ibu/Saudara untuk memberikan informasi mengenai Peran KPU dalam pemutakhiran daftar Pemilih di Kabupaten Pemalang tahun 2018. Keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, Untuk itu di mohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan lengkap jujur, dan benar.

3. Identitas Informan

Nama :.....

Jenis Kelamin : L/P

Pekerjaan (Jabatan) :.....

Alamat :.....

Tingkat Pendidikan :.....

1. Bagaimana pelaksanaan pemutakhiran data pada saat pemilu, Pemilihan Gubernur tahun 2018.
2. Siapa yang melaksanakan pemutakhiran data dari tingkat atas sampai tingkat bawah
3. bagaimana peran KPU dalam pemutakhiran data pemilih.
4. Pada saat pelaksanaan pemutakhiran data apakah KPU melakukan pengawasan secara langsung kepada petugas
5. Apakah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) aktif keliling mendatangi rumah warga atau menunggu warga mendatangi petugas
6. Apabila ada pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam A-kwk apa yang harus dilakukan
7. Apabila terdapat kesalahan pada data pemilih apa yang harus dilakukan ?
8. Apa yang dilakukan anda apabila ada pemilih yang meninggal, pindah domisili atau tidak dikenal.
9. Apabila ada pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tapi terdaftar dalam A-kwk apa yang anda lakukan.
10. Apabila ada anggota TNI/POLRI terdaftar sebagai pemilih apa yang anda lakukan
11. Apabila ada pemilih yang tidak dapat ditemui pada saat akan di data apa yang harus dilakukan ?
12. Apabila ada pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya karena alasan hukum tertentu tetapi terdaftar dalam Fom A-kwk apa yang dilakukan ?
13. Bagaimana upaya anda bagi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya
14. Apabila ada pemilih yang terdaftar dalam A-kwk tetapi berdasarkan Identitas KTP/KK bukan warga asli daerah tempat petugas mendata, apa yang dilakukan
15. Berdasarkan data pemilih tambahan jumlahnya cukup tinggi mencakup semua kecamatan di kab.pemalang , menurut anda mengapa demikian
16. Menurut anda siapa yang berperan penting dalam memutakhirkan data sehingga jumlah pemilih tambahan tidak banyak ? mengapa demikian
17. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam melakukan pemutakhiran data ?

18. Apa kendala atau hambatan dilapangan pada saat melakukan pemutakhiran data ?
19. Sebagai panitia pelaksana pemutakhiran data apa harapan anda untuk pemilu yang akan datang.

KABUPATEN/NOTA
PROVINSI

PEMALANG
JAWA TENGAH

MODEL 081 RENCANA
Halaman 2-1

KABUPATEN/NOTA			JAWA TIMUR			RINCIAN												Jumlah		
PROVINSI																		Akses		
NO.	URAIAN																		Jumlah	
B.	DATA PENGIRAN DISABILITAS/PENYANDANG cacat	AMPELODIN C	BAKASBOLO MG	BELEK	BOROH	COMAL	MOCA	PENALANG 9	PETIKERAN 10	PUKOKAN 11	BANDONGAN AL 12	TAMAL 13	UDUKAN 14	WARINGKIN G 15	WATKUNING L 16		17	18		
1	Peneliti disabilitas/penyandang cacat	LK	28	25	64	53	86	68	225	81	36	62	73	40	31	52	29	1.767	906	
		PR	29	22	77	99	55	69	182	102	27	47	73	37	52	29	51	2.280		
		JML	57	47	145	112	141	137	407	184	63	109	146	85	83	6	5	1.993		
		LK	8	4	18	25	25	10	41	13	11	16	22	22	9	15	12	17	413	
2	Peneliti disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan alat bantu	PR	10	3	9	16	8	13	43	18	3	12	22	9	21					
		JML	18	7	27	41	31	23	84	31	14	28	44	25	21					
RINCIAN																				
		BANDONGAN																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WATKUNING																		
		WAT																		

URAIAN		RINCIAN																	
NO.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DATA PENGUNJUNGAN SURAT SILAHA	ABRIKADON C	BANTARADOLA NG	BEKIR	BOGOK	COMAL	MOCA	PESALANG	PITAMBARA	PULOKATI	RANDUDONGAL	TAMUK	UBUKAT	WANGICPIN G	WATANGINUN L				
C																			
1	Jumlah surat masuk yang diterima termasuk cadangan 2,5%	57.034	65.695	88.685	47.812	71.012	54.170	146.472	126.188	45.582	86.314	127.984	87.090	34.031	52.744	1.103.817			
2	Jumlah surat masuk yang diserahkan oleh peneliti karena rusak dan/atau telah habis	16	19	45	18	41	33	268	162	5	28	14	23	1	16	465.327			
3	Jumlah surat masuk yang tidak digunakan termasuk sisa surat rusak cadangan	23.472	28.248	40.787	18.879	26.966	24.741	57.425	52.763	18.876	36.814	60.310	39.897	14.172	21.977	437.803			
4	Jumlah surat masuk yang digunakan	33.546	37.428	47.857	28.915	44.005	29.396	88.779	73.263	26.701	49.474	77.660	47.170	19.858	33.751				
NAMA / TANDA TANGAN KEPU KABUPATEN / KOTA		S. H. KARTONO, SIP																	
KETERANGAN																			

1. ARDI, RAMA, SHI		2. MUSTACHIRIN, SP4		3. CHABUR, UMAM, SHI		4. SUPRIYANTO, ST		S. H. MARTONO, SIP	
1. BACON, TOTOR, S. SHI		2. SLAMET, JOKO, ARYANTO		3. CHABUR, UMAM, SHI		4. SUPRIYANTO, ST		S. H. MARTONO, SIP	

KABUPATEN/ROTA
PROVINSI

PIDALANG
JAWA TIMUR

MOJOK DRI-KAW
Mekesha 3-1

URUTAN		RINCIAN															
NO.	RENCANA PROSEDURNYA SUDAH PASANGIN CALON	ARTIKEL G	MARTINIA H	REKOR	ROKOH	CONAL	MOCA	PSYALANG	PTTAJURAN	PROGESS	KARDOORKE AL	TUJUAN	UTRONG	WALANGOR G	WATKOROS L	REKOR	REKOR ABOR
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.P. dan H. TAI VASIN	19,905	20,324	27,650	16,774	25,480	14,810	45,762	40,442	16,710	23,931	41,661	28,898	10,426	19,508	352,281	
2	H. SUDIRMAN SAUD dan H. IDA FAUZIYAH	12,886	16,130	18,920	11,460	17,474	13,542	39,975	31,402	8,147	24,412	34,301	17,618	8,527	13,192	287,986	
E.	RENCANA SELINJIB SUDAH SAKN	32,791	36,454	46,570	28,234	42,934	28,352	85,737	71,844	24,857	48,343	75,962	46,516	18,953	32,700	620,267	
F.	RENCANA SUDAH TITIK SAKN	755	974	1,287	681	1,051	1,044	3,042	1,419	1,444	1,131	1,698	654	905	1,051	17,536	
C.	RENCANA SELINJIB SUDAH SAKN DAN SUDAH TITIK SAKN (C + F)	33,546	37,428	47,857	28,915	44,005	29,396	88,779	73,263	26,701	49,474	77,660	47,170	19,858	33,751	637,803	

NAMA/TANDA TANGAN BPI KABUPATEN/ROTA			
1. ABGIC, RADIK, SHI	2. MUSTACHIRIN, SPMI	3. CHAIRUL UMAM, SHI	4. SUPRIYANTO, ST
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON			
1. BASONG TOTOK S. SH	2. SLAMET POKO ARYANTO	5. H. MARIYONO, ST	



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Sekretariat : Jl. Halmahera Km. I Telp. (0283) 323290

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, **Senin tanggal 1 Februari 2021** Pukul 08.30 wib sampai dengan selesai berdasar Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal tentang Susunan Tim Penguji Ujian Skripsi atau Pendadaran bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal tingkat Sarjana :

1. Nama : **Dr. Nuridin, SH., MH**
NIPY : 9351091960
2. Nama : **Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si**
NIPY : 16952681974
3. Nama : **Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si**
NIPY : 196305271988032001

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya.

Nama : **Nanda Herningtyas Apriliani Eka Kusuma**
NPM : 2116500039
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pemalang 2018

	Angka	Equivalen
Nilai		
Keterangan		

Demikian Berita Acara Ujian Skripsi ini dibuat untuk diketahui dan digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Anggota,

Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si
NIP. 196305271988032001

Sekretaris,

Agus Setio W, S.IP., M.Si
NIPY. 16952681974

Ketua,

Dr. Nuridin, SH., MH
NIPY. 9351091960

Dekan,

Dr. Nuridin, SH., MH
NIPY. 9351091960